

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Transformasi dari pembayaran tunai menuju non-tunai menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan otoritas moneter dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran digital adalah penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diresmikan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR (Nurholiza et al., 2025).

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan kebijakan strategis Bank Indonesia yang dirancang untuk menyelesaikan masalah fragmentasi sistem pembayaran digital di Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai penyedia jasa pembayaran digital dalam satu standar kode QR. QRIS memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi lintas aplikasi menggunakan satu kode QR, sehingga meningkatkan efisiensi, kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam transaksi pembayaran digital. Hal ini secara teori sejalan dengan konsep pengurangan *transaction costs* yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat sistem pembayaran ritel nasional.

Salah satu inovasi penting dalam pembayaran digital di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank

Indonesia sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR. QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai kode QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, sehingga menciptakan sistem yang lebih sederhana, cepat, efisien, dan interoperabel. Tujuan strategis QRIS adalah memperluas akses transaksi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Penelitian oleh (Muhammad et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor seperti *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* berpengaruh signifikan terhadap intensi masyarakat menggunakan QRIS, yang secara tidak langsung menunjang adopsi sistem pembayaran digital yang lebih luas. Sedangkan penelitian (Qolyubi & Munandar, 2025a) dari menemukan bahwa QRIS telah memperluas akses layanan keuangan digital dan meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat, menggambarkan pergeseran perilaku pembayaran dari tunai ke digital secara signifikan.

Dari sudut pandang inklusi keuangan, optimalisasi sistem pembayaran QRIS memperluas penetrasi layanan keuangan kepada kelompok yang sebelumnya sulit mengakses sistem perbankan formal, termasuk pelaku UMKM di daerah pinggiran dan pedesaan. Penelitian (Handayani & Soeparan, 2025) menegaskan bahwa QRIS berperan sebagai enabler dalam memperluas inklusi keuangan melalui digitalisasi pembayaran yang murah, aman, dan mudah diakses oleh berbagai segmen masyarakat.

Manfaat QRIS tidak hanya terbatas pada sisi efisiensi transaksi, tetapi juga berdampak pada pencatatan keuangan yang lebih baik, perencanaan usaha, serta potensi penguatan kapasitas UMKM untuk memperoleh pembiayaan formal di masa

depan. Hal ini ditegaskan oleh (Wardhani et al., 2023), yang menunjukkan adopsi QRIS berdampak positif pada kinerja keuangan UMKM termasuk peningkatan volume transaksi dan arus kas usaha.

Dalam konteks ekonomi makro, perluasan penggunaan QRIS berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi domestik melalui peningkatan akses pembayaran digital, yang pada gilirannya mendorong perputaran uang di masyarakat (*velocity of money*). Sistem pembayaran digital yang semakin luas juga berpotensi mempercepat penyerapan produk dan jasa lokal, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional, terutama di provinsi seperti Sulawesi Selatan yang menjadi fokus penelitian ini.

Dengan demikian, QRIS berfungsi sebagai transformator sistem pembayaran nasional yang tidak hanya menyederhanakan proses transaksi, tetapi juga memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi masyarakat faktor-faktor yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Penelitian mengenai pengaruh penggunaan QRIS terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat relevan, karena dapat memberikan bukti empiris atas hubungan kausal antara adopsi teknologi pembayaran digital yang lebih efisien dengan perilaku konsumsi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Data penggunaan QRIS menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan sepanjang 2025. Hingga kuartal II 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 57 juta orang, hampir mendekati target nasional 58 juta pengguna di akhir tahun. Volume transaksi juga meningkat pesat mencapai lebih dari 6,1 miliar transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp317 triliun, atau tumbuh lebih dari 120% secara

tahunan (year on year) dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh lonjakan jumlah merchant dan pengguna di seluruh Indonesia (Republika, 2025).

Selain itu, QRIS tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga mulai mencatat transaksi *cross-border*, seperti transaksi antarnegara dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sampai Juni 2025 mencapai nilai Rp1,66 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS mulai memperoleh peran penting dalam konteks ekonomi digital lintas negara (Antara News, 2025).

Sejak Bank Indonesia (BI) memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Agustus 2019, sistem pembayaran ini menjadi salah satu instrumen utama dalam percepatan digitalisasi sektor pembayaran di Indonesia. QRIS dirancang sebagai standar nasional yang mengintegrasikan berbagai penyedia jasa pembayaran dalam satu kode QR sehingga konsumen dapat melakukan transaksi non-tunai di seluruh jaringan merchant hanya dengan satu kode QR yang sama. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dan efisiensi transaksi di berbagai segmen ekonomi, termasuk di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bank Indonesia, 2019).

Perkembangan QRIS di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS di Indonesia telah mencapai lebih dari 55 juta orang, dengan merchant QRIS mencapai puluhan juta unit sepanjang tahun 2024. Volume dan nilai transaksi QRIS juga tumbuh signifikan mencerminkan semakin luasnya adopsi masyarakat terhadap metode pembayaran digital ini (Berita Gamasi, 2025).

Pertumbuhan QRIS tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke berbagai provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan data Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, jumlah pengguna QRIS aktif di Sulawesi Selatan telah mencapai lebih dari 1,3 juta orang per akhir tahun 2025, dengan jumlah merchant QRIS mencapai lebih dari 1,37 juta unit. Sepanjang tahun 2025, volume transaksi QRIS di Sulawesi Selatan tumbuh lebih dari 116 persen secara tahunan, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp19,04 triliun, menunjukkan adopsi yang kian meluas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha (Ramadhani, 2026).

Sebelumnya, sepanjang tahun 2024, QRIS di Sulawesi Selatan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan baik dari sisi volume maupun jumlah pengguna. Realisasi transaksi QRIS di tahun tersebut mencapai puluhan juta kali transaksi dengan nilai mencapai triliunan rupiah, serta pertumbuhan pengguna dan merchant yang konsisten setiap tahunnya (sulselsatu.com, 2025).

Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa QRIS telah menjadi fenomena yang tidak hanya berkontribusi pada kemudahan transaksi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat di tingkat regional seperti di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam hal daya beli masyarakat.

Pertumbuhan penggunaan QRIS ini mencerminkan pergeseran struktur perilaku ekonomi masyarakat yang semakin nyaman memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya generasi milenial dan Gen Z yang dominan dalam penggunaan QRIS, kecenderungan ini menyebar hingga berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Secara teori, kemudahan akses dan kecepatan bertransaksi melalui QRIS dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli merujuk pada kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dengan pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, pembayaran digital yang efisien dapat meningkatkan frekuensi transaksi dan memperluas ruang konsumsi masyarakat. Pembayaran non-tunai juga memungkinkan masyarakat melakukan pembelian tanpa tergantung pada ketersediaan uang fisik, mengurangi biaya transaksi, serta mempercepat keputusan pembelian. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan teknologi pembayaran digital dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan keputusan pembelian konsumen, karena memberikan rasa aman, cepat, dan praktis dalam melakukan transaksi finansial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan penggunaan QRIS. (Paramita & Cahyadi, 2024) menemukan bahwa *perceived risk*, *performance expectancy*, *social influence*, dan *effort expectancy* berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan QRIS. Selain itu, perilaku penggunaan QRIS meningkat sejalan dengan kondisi yang mendukung adopsi teknologi digital. Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan QRIS juga memengaruhi keputusan pembelian konsumen, di mana sistem pembayaran digital ini memberikan dampak signifikan pada keputusan konsumen dalam pembelian barang dan jasa (misalnya di kota Sukabumi).

Di sisi lain, dinamika **inflasi** turut menjadi variabel penting yang mempengaruhi perekonomian, terutama kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Inflasi yang tinggi berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Daya beli sendiri

merupakan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi meningkat tanpa disertai peningkatan pendapatan yang proporsional, daya beli masyarakat cenderung menurun.

Penelitian mengenai sistem pembayaran digital tidak hanya fokus pada intensi penggunaan, tetapi juga dampak nyata terhadap pola konsumsi. Penelitian (Puspita Sari & Putri, 2025) menunjukkan bahwa sistem teknologi pembayaran digital berhubungan dengan niat beli masyarakat dalam konteks cashless economy. Demikian pula, penelitian (Maulana et al., 2025) menemukan bahwa penggunaan QRIS berkorelasi positif dengan pola konsumsi mahasiswa. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digital payment seperti QRIS berpotensi memengaruhi tingkah laku konsumen termasuk di dalamnya aspek keputusan pembelian dan frekuensi transaksi yang merupakan komponen penting dalam kerangka daya beli masyarakat.

Namun demikian, kebutuhan untuk menganalisis pengaruh QRIS secara spesifik terhadap daya beli masyarakat secara empiris di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbatas. Provinsi ini merupakan daerah yang strategis secara ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan populasi dan aktivitas perdagangan yang intensif, sehingga sangat relevan dijadikan objek penelitian. Melihat fenomena meningkatnya penggunaan QRIS dan perubahan perilaku konsumsi, penting dilakukan kajian yang menghubungkan penggunaan QRIS dengan daya beli masyarakat secara langsung. Hal ini diperlukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun pemangku kepentingan lain

dalam memaksimalkan pemanfaatan sistem pembayaran digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi manfaat (Davis, 1989). Dalam konteks QRIS, kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, efisiensi pembayaran, serta keamanan transaksi mendorong masyarakat untuk mengadopsi dan menggunakan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Bank Indonesia, 2019). Selain itu, penggunaan QRIS juga sejalan dengan *Transaction Cost Theory* yang menyatakan bahwa penurunan biaya transaksi baik biaya waktu, biaya pencarian informasi, maupun biaya pelaksanaan transaksi akan meningkatkan efisiensi pertukaran ekonomi dan mendorong intensitas transaksi masyarakat (Coase, 2012; Williamson, 2008). Penurunan biaya transaksi melalui QRIS berpotensi mengubah perilaku ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal frekuensi dan pola konsumsi.

Perubahan perilaku konsumsi masyarakat tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Perilaku Konsumen, yang menyatakan bahwa keputusan konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan harga, tetapi juga oleh faktor situasional seperti sistem pembayaran yang digunakan (Kotler & Armstrong, 2016). Dalam ekonomi digital, penggunaan alat pembayaran non-tunai seperti QRIS juga menimbulkan *cashless effect*, yaitu kecenderungan meningkatnya konsumsi akibat berkurangnya hambatan fisik dan psikologis dalam bertransaksi (Prelec & Simester, 2001). Kemudahan dan kecepatan transaksi digital memungkinkan masyarakat melakukan

pembelian dengan lebih sering dan lebih fleksibel, sehingga meningkatkan intensitas konsumsi dan perputaran uang dalam perekonomian (Mishkin, 2007).

Di sisi lain, persepsi inflasi sebagai variabel makroekonomi berlandaskan pada Teori Keynesian dan Teori Moneter, yang menjelaskan bahwa kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan menurunkan pendapatan riil dan kemampuan konsumsi masyarakat (Friedman, 1968; Keynes, 1937). Inflasi mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku konsumsi, baik dengan mengurangi jumlah konsumsi, mengalihkan konsumsi ke barang substitusi, maupun menunda pembelian barang non-esensial (Mankiw, 2021). Dengan demikian, inflasi tidak hanya berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi daya beli secara tidak langsung melalui perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Daya beli masyarakat dalam penelitian ini berlandaskan pada teori pendapatan riil dan permintaan agregat, yang menyatakan bahwa kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa sangat ditentukan oleh pendapatan riil dan tingkat harga (Todaro & Stephen C, 2009). Dalam konteks ekonomi digital, daya beli tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan inflasi, tetapi juga oleh kemudahan akses terhadap sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital seperti QRIS memperluas ruang konsumsi masyarakat dengan memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan efisien, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli secara fungsional (Pazarbasioglu et al., 2020).

Penggunaan QRIS dan persepsi inflasi dipandang sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perilaku konsumsi masyarakat diposisikan sebagai

variabel intervening yang menjelaskan mekanisme pengaruh penggunaan QRIS dan persepsi inflasi terhadap daya beli masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian yang diajukan berjudul “Analisis Pengaruh Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Apakah Persepsi inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 3) Apakah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 4) Apakah Persepsi inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?

- 5) Apakah perilaku konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 6) Apakah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat melalui perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 7) Apakah penggunaan persepsi inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat melalui perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh persepsi inflasi terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh persepsi inflasi terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumsi masyarakat terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Untuk menganalisis peran perilaku konsumsi masyarakat dalam memediasi pengaruh penggunaan QRIS terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

- 7) Untuk menganalisis peran perilaku konsumsi masyarakat dalam memediasi pengaruh persepsi inflasi terhadap daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai manajemen strategis dalam implementasi QRIS di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya, makroekonomi dan ekonomi keuangan digital khususnya daya beli masyarakat yang dilihat dari penggunaan merchant QRIS.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia, Perbankan atau Lembaga Keuangan serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam merumuskan kebijakan/manajemen strategis implementasi QRIS di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan fenomena, teori, metode, dan hasil penelitian ini, laporan penelitian akan disusun secara sistematis dalam 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang pelaksanaan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep-konsep tentang QRIS termasuk jumlah pengguna, volume transaksi dan jumlah merchant QRIS, daya beli masyarakat, *Technology Acceptance Model* (TAM) serta kajian empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini dipaparkan kerangka konseptual, hipotesis kerja, dan alur pemikiran penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta definisi operasional variabel.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian, termasuk gambaran umum perusahaan, deskripsi data dan variabel penelitian, serta analisis data menggunakan metode yang telah ditentukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan yang akan datang agar lebih membantu kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran merupakan elemen fundamental dalam infrastruktur ekonomi modern karena berfungsi sebagai sarana utama pertukaran nilai dalam aktivitas ekonomi. Bank Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi (Bank Indonesia, 2024). Keberadaan sistem pembayaran yang efisien sangat menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa, stabilitas sistem keuangan, serta pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi makro, sistem pembayaran memengaruhi kecepatan perputaran uang (*velocity of money*). Menurut (Mishkin, 2007), sistem pembayaran yang modern dan efisien akan mempercepat perputaran uang, meningkatkan volume transaksi, serta memperbesar potensi pertumbuhan konsumsi dan output ekonomi. Sebaliknya, sistem pembayaran yang tidak efisien akan meningkatkan transaction cost, menghambat aktivitas ekonomi, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi sistem pembayaran dari tunai menuju non-tunai merupakan respons atas meningkatnya kompleksitas ekonomi, pertumbuhan transaksi ritel, dan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membawa implikasi struktural terhadap perilaku ekonomi masyarakat.

Sistem pembayaran digital adalah mekanisme pembayaran yang memanfaatkan teknologi elektronik dan jaringan komunikasi untuk memproses transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Bentuk sistem pembayaran digital meliputi uang elektronik (*e-money*), dompet digital (*e-wallet*), mobile banking, serta pembayaran berbasis kode QR.

Menurut (Pazarbasioglu et al., 2020), sistem pembayaran digital memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan, efisiensi ekonomi, dan transparansi transaksi. Sistem ini memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan akses perbankan untuk tetap terhubung dengan sistem keuangan formal.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pembayaran digital berperan sebagai alat strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya kelompok UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Bank Indonesia secara aktif mendorong penggunaan pembayaran digital sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 (Bank Indonesia, 2025).

2.1.2 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital ke dalam satu standar interoperabel (Bank Indonesia, 2019).

Dalam rangka mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran guna mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi instrumen

strategis dalam meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat (Suri & Jack, 2016).

Salah satu inovasi sistem pembayaran yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penggunaan Quick Response (QR) Code sebagai instrumen pembayaran nontunai. QR Code dinilai memiliki keunggulan dibandingkan kanal pembayaran elektronik lainnya, khususnya dari sisi biaya investasi infrastruktur yang relatif lebih rendah dibandingkan *Electronic Data Capture* (EDC), serta kemudahan implementasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Sulistyaningsih & Hanggraeni, 2022). Karakteristik tersebut menjadikan QR Code sebagai instrumen pembayaran yang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS dikembangkan berbasis standar EMVCo, yang menjamin interoperabilitas antarpemangku jasa pembayaran dan antar instrumen pembayaran. Penerapan standar EMVCo juga memungkinkan interoperabilitas QRIS secara lintas negara (*cross-border*), mengingat standar ini telah digunakan secara luas di berbagai negara. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berperan dalam mendukung transaksi domestik, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memfasilitasi transaksi internasional.

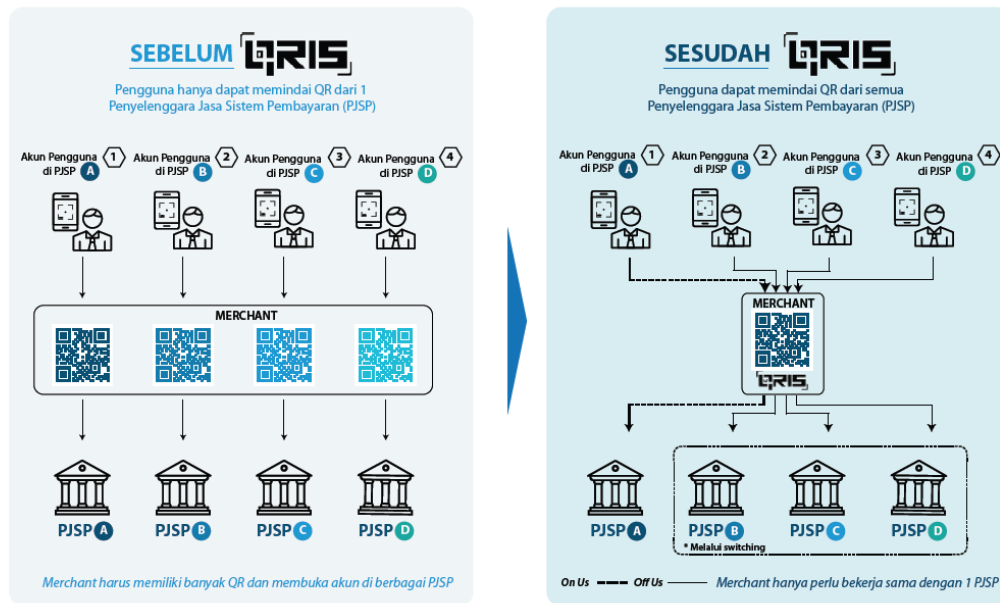
QRIS mengusung konsep UNGGUL, yaitu *Universal*, *GampanG*, *Untung*, dan *Langsung*. Konsep *Universal* menunjukkan bahwa QRIS dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sedangkan *GampanG* mencerminkan kemudahan dan keamanan transaksi berbasis perangkat digital. Aspek *Untung* menggambarkan efisiensi biaya dan waktu bagi konsumen maupun

merchant, sementara *Langsung* menekankan kecepatan dan real-time settlement dalam proses transaksi (Bank Indonesia, 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kecepatan transaksi digital berkontribusi terhadap peningkatan intensitas konsumsi masyarakat (Liébana-Cabanillas et al., 2021). Sesuai dengan perkembangannya, saat ini terdapat dua metode QR pembayaran yaitu:

- a. *Merchant Presented Mode* (MPM): QR Code ditunjukkan oleh merchant sehingga konsumen hanya perlu melakukan scan QR. QR metode ini dapat bersifat statis atau dinamis. QR statis adalah QR yang tidak berubah (umumnya berbentuk sticker/acrylic). QR dinamis adalah QR yang dapat berubah-ubah dan umumnya dicetak melalui EDC atau ditunjukan merchant melalui layar device elektronik.
- b. *Customer Presented Mode* (CPM): QR Code ditunjukkan oleh konsumen sementara merchant akan memindai QR. Pada model ini, QR Code hanya berbentuk dinamis karena QR code ini di-generate oleh user setiap akan melakukan transaksi.

QRIS diperlukan untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien. Melalui penggunaan satu standar QR Code, penyedia barang dan jasa (merchant) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari penerbit yang berbeda (Gambar 1). Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrument pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau UE server based. QRIS dikembangkan menggunakan standar European Master Visa Co (EMV Co) yang memungkinkan interoperabilitas domestik dan internasional (Natsir et al., 2023).

Gambar 1 Sistem Pembayaran Sebelum dan Setelah QRIS



Selain itu, QRIS juga mendukung transaksi lintas negara (*cross-border payment*). Hingga saat ini, kerja sama QRIS telah terjalin dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta terus diperluas ke negara-negara lain di kawasan Asia dan Timur Tengah. Integrasi pembayaran lintas negara ini berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan konsumsi lintas wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat (Bimantara & Tri Nugraha, 2025).

Di tingkat regional, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan adopsi QRIS sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital dan perluasan transaksi nontunai. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta integrasi berbagai aplikasi pembayaran melalui QRIS diduga mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, baik dari sisi frekuensi maupun nilai transaksi. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital berkorelasi positif dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat (Wati & Nasution, 2025).

2.1.3 Persepsi inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam perekonomian makro yang mencerminkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Inflasi tidak hanya menggambarkan perubahan harga pada satu atau dua komoditas, tetapi mencerminkan penurunan daya beli uang secara keseluruhan. Menurut (Williamson, 2007) inflasi didefinisikan sebagai peningkatan tingkat harga rata-rata dalam perekonomian yang terjadi secara terus-menerus, sehingga menyebabkan nilai riil uang menurun.

Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, yang diukur berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi menjadi perhatian utama pemerintah dan otoritas moneter karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan daya beli.

Inflasi yang stabil dan terkendali mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, menurunkan kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu aktivitas konsumsi dan investasi.

Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan tingkat keparahan, penyebab, dan cakupan wilayah.

- Inflasi berdasarkan tingkat keparahan
 1. Inflasi ringan ($< 10\%$ per tahun)
 2. Inflasi sedang ($10\text{--}30\%$ per tahun)
 3. Inflasi berat ($30\text{--}100\%$ per tahun)
 4. Hiperinflasi ($> 100\%$ per tahun)

Inflasi ringan umumnya masih dapat ditoleransi dan bahkan dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi berat dan hiperinflasi dapat menimbulkan distorsi ekonomi yang serius.

- Inflasi berdasarkan penyebabnya
 1. *Demand-pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat melebihi kapasitas produksi.
 2. *Cost-push inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, upah, atau energi.
 3. Inflasi ekspektasi, yang dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan.

- Inflasi berdasarkan cakupan wilayah

Inflasi dapat terjadi pada tingkat nasional maupun regional. Inflasi regional, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh kondisi lokal, distribusi barang, struktur ekonomi daerah, serta kebijakan pemerintah daerah.

Dalam teori ekonomi makro, inflasi memiliki hubungan erat dengan pendapatan riil, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Teori Keynesian menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi akibat peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, teori klasik dan monetaris menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang berkaitan dengan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Menurut Friedman (1968), inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter, yang berarti bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan akan mendorong kenaikan harga. Inflasi yang tinggi akan menurunkan nilai riil pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat ikut menurun.

2.1.4 Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dengan pendapatan yang dimilikinya. Daya beli merupakan indikator penting kesejahteraan ekonomi dan sangat menentukan tingkat konsumsi masyarakat (Todaro & Stephen C, 2009).

Secara teoritis, daya beli dipengaruhi oleh pendapatan riil, inflasi, tingkat harga, serta akses terhadap sistem keuangan. Dalam konteks ekonomi modern, kemudahan sistem pembayaran juga berperan dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Kemudahan transaksi dapat meningkatkan frekuensi pembelian dan memperluas ruang konsumsi, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.

Secara teoritis, daya beli dipengaruhi oleh pendapatan riil, inflasi, tingkat harga, serta akses terhadap sistem keuangan. Dalam konteks ekonomi modern, kemudahan sistem pembayaran juga berperan dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Kemudahan transaksi dapat meningkatkan frekuensi pembelian dan memperluas ruang konsumsi, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.

Dalam perspektif ekonomi makro, daya beli masyarakat berperan sebagai determinan utama permintaan agregat. Peningkatan daya beli akan mendorong konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan daya beli dapat menekan konsumsi dan memperlambat aktivitas ekonomi (Mankiw, 2021).

Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, antara lain:

1. Pendapatan Riil

Pendapatan riil merupakan faktor utama yang menentukan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan riil akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sedangkan penurunan pendapatan riil akan menurunkan daya beli (Todaro & Stephen C, 2009).

2. Tingkat Harga dan Inflasi

Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat (Mankiw, 2021).

3. Akses terhadap Sistem Keuangan

Akses terhadap sistem keuangan formal memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efisien. (Pazarbasioglu et al., 2020) menyatakan bahwa inklusi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Literasi Keuangan dan Teknologi

Tingkat literasi keuangan dan literasi digital memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Semakin tinggi literasi, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

5. Kemudahan Sistem Pembayaran

Kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran, termasuk pembayaran digital berbasis QRIS, dapat memengaruhi perilaku konsumsi dengan menurunkan hambatan transaksi. Kemudahan ini berpotensi meningkatkan frekuensi dan nilai konsumsi masyarakat (Mishkin, 2007).

Peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat adalah tergantung pada kondisi perekonomian. Ada tiga indikator yang bisa memengaruhinya, yaitu:

1) Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

IKESI adalah indeks pengukuran tingkat kepercayaan konsumen terkait pendapatan saat ini dibandingkan dengan enam bulan yang lalu. Indeks ini disebabkan oleh sejumlah hal yaitu ketepatan waktu saat ini untuk membeli barang tahan lama dan berapa banyak lapangan kerja yang ada.

2) Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK)

Indeks IEKE digunakan untuk mengukur ekspektasi konsumen terkait kondisi ekonomi beberapa bulan ke depan. Ada sejumlah aspek yang memengaruhi ekspektasi konsumen, yaitu lapangan pekerjaan, penghasilan, serta kegiatan usaha yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

3) Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

IKK adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat optimisme atau pesimisme konsumen mengenai kondisi perekonomian. Minat konsumen yang tinggi atau rendah untuk berbelanja akan berpengaruh terhadap kegiatan industri dan bisnis dari suatu negara. Dengan demikian, angka indeks IKK yang naik menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat meningkat. Begitupun sebaliknya. Pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam ekonomi digital, daya beli masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan harga, tetapi juga oleh kemudahan akses teknologi digital. Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan fleksibel, sehingga memperluas ruang konsumsi masyarakat.

Menurut (Pazarbasioglu et al., 2020), pembayaran digital berperan dalam meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok

berpendapatan rendah dan UMKM. Dengan adanya sistem pembayaran digital, masyarakat dapat mengakses barang dan jasa dengan lebih mudah, yang berpotensi meningkatkan daya beli secara fungsional.

Dalam penelitian ini, daya beli masyarakat dipahami sebagai kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam tingkat konsumsi dan kemudahan akses transaksi. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital diposisikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi daya beli melalui perubahan perilaku transaksi dan konsumsi.

2.1.5 Teori Perilaku Konsumen

Teori perilaku konsumen merupakan kajian yang membahas proses pengambilan keputusan individu atau rumah tangga dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam ilmu ekonomi dan pemasaran, perilaku konsumen dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi keputusan konsumsi (Kotler & Keller, 2016).

Dalam perspektif ekonomi makro, perilaku konsumsi masyarakat merupakan komponen utama pembentuk permintaan agregat. Tingkat konsumsi sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu dalam melakukan pembelian barang dan jasa. Namun demikian, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan harga, tetapi juga oleh kemudahan akses dan sistem pembayaran yang digunakan (Mankiw, 2021).

Sistem pembayaran berperan sebagai faktor situasional yang dapat menurunkan atau meningkatkan hambatan transaksi. Pembayaran digital, termasuk QRIS, mampu mengurangi hambatan fisik dan psikologis dalam

bertransaksi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan konsumsi. Dengan adanya sistem pembayaran yang mudah dan efisien, konsumen cenderung meningkatkan frekuensi pembelian dan nilai transaksi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Menurut teori perilaku konsumen, kemudahan pembayaran dapat menurunkan hambatan transaksi dan meningkatkan kecenderungan konsumsi jangka pendek, termasuk pembelian spontan (*impulse buying*). Dalam kerangka ekonomi, peningkatan kemudahan transaksi berpotensi meningkatkan kecepatan perputaran uang dan volume konsumsi masyarakat (Mishkin, 2007).

2.1.6 Teori Transaction Cost

Teori biaya transaksi menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi mengandung biaya, baik berupa biaya waktu, informasi, maupun pembayaran. (Williamson, 2007) menjelaskan bahwa penurunan biaya transaksi akan meningkatkan efisiensi pertukaran ekonomi.

Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital menurunkan biaya transaksi dengan mengurangi kebutuhan uang tunai dan mempercepat proses pembayaran. Penelitian (Qolyubi & Munandar, 2025) membuktikan bahwa QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memengaruhi perilaku keuangan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas konsumsi.

2.1.7 Technology Acceptance Model (TAM)

Teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi baru oleh individu maupun organisasi. Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh (Davis, 1989).

Dalam konteks QRIS, TAM digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat menggunakan QRIS, bukan untuk membentuk variabel baru. Oleh karena itu, TAM dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual pembentukan indikator variabel penggunaan QRIS, khususnya:

- a. kemudahan penggunaan,
- b. kecepatan transaksi,
- c. efisiensi pembayaran.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Pengaruh Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), teknologi yang dipersepsikan mudah digunakan dan bermanfaat akan lebih sering diadopsi, sehingga memengaruhi perilaku pengguna dalam bertransaksi (Davis, 1989). Intensitas penggunaan QRIS menurunkan hambatan transaksi dan mendorong peningkatan frekuensi serta nilai konsumsi masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh cashless effect theory yang menyatakan bahwa penggunaan pembayaran non-tunai cenderung meningkatkan pengeluaran karena berkurangnya persepsi pengorbanan saat membayar (Prelec & Simester, 2001).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penggunaan pembayaran digital dan perilaku konsumsi. Penelitian (Setiawan & GP, 2025) menemukan bahwa penggunaan QRIS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi mahasiswa, di mana kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi melalui QRIS mendorong frekuensi belanja lebih tinggi di

kalangan responden mahasiswa di Bandung. Di Indonesia, penelitian (Zahra et al., 2023) menemukan bahwa perilaku konsumtif akan meningkat seiring dengan meningkatnya digital payment. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh (Arango et al., 2015) yang menyatakan bahwa metode pembayaran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi, terutama pada konsumen dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi.

2.2.2. Pengaruh Persepsi inflasi terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat

Persepsi inflasi memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa yang menurunkan pendapatan riil. Berdasarkan Teori Keynesian, inflasi menyebabkan penurunan daya beli sehingga masyarakat menyesuaikan pola konsumsi dengan mengurangi konsumsi non-esensial, menunda pembelian, atau beralih ke barang substitusi (Keynes, 1937). Pandangan ini diperkuat oleh teori moneter yang menyatakan bahwa inflasi mengurangi nilai riil uang dan membatasi kemampuan konsumsi masyarakat (Friedman, 1968).

Secara empiris, penelitian (Deaton, 1992) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Penelitian (Sekarsari et al., 2024) juga menemukan bahwa peningkatan inflasi menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan. Di Indonesia, penelitian (Martanto et al., 2021) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Namun, hasil yang tidak signifikan ditemukan dalam penelitian (Hall, 1978) melalui *Permanent Income Hypothesis*, yang menyatakan bahwa konsumsi didasarkan pada pendapatan jangka panjang sehingga inflasi jangka pendek tidak selalu memengaruhi perilaku konsumsi secara signifikan.

2.2.3. Pengaruh Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap Daya Beli Masyarakat

Penggunaan QRIS berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan aksesibilitas transaksi. Berdasarkan Transaction Cost Theory, penurunan biaya transaksi akan meningkatkan efektivitas aktivitas ekonomi dan memperluas peluang konsumsi (Williamson, 2008). QRIS memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat dan fleksibel, sehingga meningkatkan kemampuan fungsional dalam memenuhi kebutuhan.

Penelitian terdahulu oleh (Sarif, 2026) menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses konsumsi masyarakat. Penelitian (Pazarbasioglu et al., 2020) juga menyatakan bahwa pembayaran digital meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi secara efektif, yang berdampak pada peningkatan daya beli fungsional. Namun demikian, penelitian (Modigliani & Brumberg, 2013) melalui *Life Cycle Theory* menyatakan bahwa daya beli lebih ditentukan oleh pendapatan dan tabungan jangka panjang, sehingga sistem pembayaran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

2.2.4. Pengaruh Persepsi inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat

Inflasi memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa menurunkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Berdasarkan teori pendapatan riil, peningkatan inflasi tanpa diimbangi kenaikan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat (Todaro & Stephen C, 2009). Inflasi yang tinggi akan menekan konsumsi rumah tangga dan memperlemah permintaan agregat.

Penelitian empiris oleh (Mankiw, 2021) menunjukkan bahwa inflasi merupakan salah satu determinan utama daya beli masyarakat. Di Indonesia,

penelitian (Supandi et al., 2025) menegaskan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa pada periode 2014-2023, sehingga mendukung hipotesis bahwa tekanan fiskal dan dinamika harga dapat melemahkan kemampuan konsumsi riil rumah tangga. Namun, penelitian (Lucas, 2012) melalui teori ekspektasi rasional menyatakan bahwa masyarakat dapat mengantisipasi inflasi yang dapat diprediksi, sehingga dampaknya terhadap daya beli menjadi tidak signifikan dalam jangka pendek.

2.2.5. Pengaruh Perilaku Konsumsi terhadap Daya Beli Masyarakat

Perilaku konsumsi masyarakat mencerminkan kemampuan ekonomi dalam mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan teori permintaan konsumen, peningkatan intensitas konsumsi menunjukkan daya beli masyarakat yang lebih tinggi (Mankiw, 2021). Konsumsi yang stabil dan meningkat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Penelitian (Friedman, 1968) menyatakan bahwa konsumsi merupakan indikator utama kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian (Blundell et al., 1994) menunjukkan bahwa pola konsumsi yang meningkat sejalan dengan peningkatan daya beli. Namun, penelitian (Dynan, 2000) menemukan bahwa konsumsi tinggi tidak selalu mencerminkan daya beli yang kuat karena dapat dipengaruhi oleh penggunaan kredit dan pembiayaan.

2.2.6. Peran Perilaku Konsumsi sebagai Variabel Mediasi

Perilaku konsumsi masyarakat diposisikan sebagai variabel intervening karena perubahan teknologi pembayaran dan kondisi inflasi tidak selalu berdampak langsung terhadap daya beli. Penggunaan QRIS memengaruhi kemudahan dan intensitas transaksi, sedangkan inflasi memengaruhi harga dan pendapatan riil, yang keduanya terlebih dahulu tercermin dalam perubahan

perilaku konsumsi masyarakat. Penelitian (Baron & Kenny, 1986) menyatakan bahwa variabel mediasi berfungsi menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel.

2.3 Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan dalam penelitian ini, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian yang berhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	(Muslikhati & Aprilianto, 2022)	<i>The Impact of a Cashless Payment System on Inflation</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel uang elektronik berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi, variabel kartu debit berpengaruh positif signifikan, variabel kartu kredit berpengaruh negatif tidak signifikan, dan variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan.
2	(Rachmacandrani et al., 2023)	<i>The Effect of Information Quality, System Quality, Ease of Use on User Satisfaction's Qris (Quick Response Indonesian Standard) in SME'S</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna QRIS. Kemudian kualitas sistem dan kemudahan bertransaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kemudahan bertransaksi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pengguna.
3	(Putri et al., 2023)	<i>The Influence of Perceived Ease and Risk of Use and Financial Literacy on Decisions to Make Transactions Using QRIS in SMES in South Denpasar</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

			bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Denpasar Selatan, risiko penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Denpasar Selatan dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Denpasar Selatan.
4	(Mareta & Meiryani, 2023)	<i>Determinants Of Interest Using Qris As A Payment Technology For E-Wallet By Z Generation In Indonesia.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, kepercayaan, pengaruh sosial, dan promosi mempunyai pengaruh positif, sedangkan risiko mempunyai pengaruh negatif terhadap minat Gen Z di Indonesia dalam menggunakan sistem pembayaran QRIS di E-wallet. .
5	(Pandu, 2023)	<i>Analysis The Effect of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Social Influence on Intention to Use (Study: Millennial QRIS User in Padang)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan, variabel persepsi kemudahan penggunaan, dan variabel pengaruh sosial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat menggunakan.
6	(Musa F. Silaen et al., 2021)	<i>Effect analysis of benefit perception, ease perception, security and risk perception of merchant interest in using quick response indonesia standard (QRIS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang menggunakan QRIS, persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang menggunakan QRIS,

			keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang menggunakan QRIS dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang menggunakan QRIS. Q
7	(Listiawati et al., 2022)	<i>QRIS Efficiency in Improving Digital Payment Transaction Services for Culinary Micro-Small and Medium Enterprises in Depok City</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan QRIS membuat pembayaran digital pada UMKM kuliner di Depok menjadi lebih efisien.